

Bupati Klaten Salurkan BLT DBHCHT Rp 5 Miliar Lebih

Bupati Klaten Sri Mulyani, dan Wakil Bupati Yoga Hardaya, menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), senilai Rp 5 miliar lebih untuk 4.150 penerima. Penyerahan dilakukan di Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (10/11/2022).

Bupati mengemukakan, setiap penerima mendapatkan Rp. 300 ribu per bulan, selama empat bulan. Yakni bulan Mei hingga Agustus, sehingga total penerimaan sebesar Rp 1.200.000. BLT DBHCHT diberikan untuk para buruh tani tembakau, atau buruh pabrik rokok. Dana sebesar Rp 5 miliar lebih tersebut disalurkan kepada penerima melalui rekening Bank Klaten.

Bupati berpesan kepada penerima untuk memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya. Penyaluran BLT DBHCHT tersebut, sebagai bentuk apresiasi kepada para buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten.

Kepala Dinas Sosial P3A dan KB Kabupaten Klaten Much. Nasir



Penerima BLT DBHCHT Kabupaten Klaten Tahun 2022.

menjelaskan dana sebesar Rp 5 miliar lebih yang disalurkan tersebut dipacak dalam APBD murni tahun 2022. "Nantinya masih ada BLT DBHCHT di anggaran APBD perubahan senilai Rp 1,8 miliar, untuk 1.475 penerima," kata Much. Nasir.

Lebih lanjut Much. Nasir menjelaskan, BLT DBHCHT diberikan pada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok. Hal itu untuk mengurangi beban mereka, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari akibat penurunan penghasilan,

karena menurunnya aktivitas pertembakauan. Meningkatkan motivasi pada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok agar tetap beraktivitas di bidang pertembakauan. Penerima BLT DBHCHT harus memenuhi sejumlah kriteria. Antara lain, penduduk Klaten dan sebagai buruh tani tembakau/buruh pabrik rokok, bukan penerima bantuan BLT DBHCHT dari Propinsi Jawa Tengah.

Anam, buruh tani tembakau

di Deles, Kemalang, mengaku senang menerima bantuan BLT DBHCHT. Anam juga mengaku pernah menanam tembakau di kebun miliknya, namun pada musim tanam kemarin ia mengalami kerugian besar. "Saya buruh. Pernah menanam tembakau juga, tapi kemarin rugi karena tanamannya mati kena hujan. Tanam tembakau cuma setahun sekali, kalau bulan-bulan November begini banyak ruginya. Bagus itu kalau pas musim panen Agustus," kata Anam.

Tulisan dan Foto : Sri Warsiti

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN BEA CUKAI SURAKARTA

LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL KE KANTOR BEA CUKAI TERDEKAT ATAU HUBUNGI NOMOR 1500 225

GEMPUR ROKOK ILEGAL

HJ. SRI MULYANI, S.M. BUPATI KLATEN H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. WAKIL BUPATI KLATEN

ROKOK POLOS TANPA CUKAI ROKOK PITA CUKAI BEKAS ROKOK PITA CUKAI PALSU ROKOK PITA CUKAI YANG BUKAN HAKNYA ROKOK DENGAN PITA CUKAI YANG TIDAK SESUAI JENIS DAN GOLONGANNYA

DISKOMINFO

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI SURAKARTA

Penetapan UMK Tunggu Keputusan Pusat

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih menunggu keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari pemerintah pusat. (UMK) akan diumumkan setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) diputuskan pemerintah pusat pada 21 November 2022. Demikian dikatakan Ganjar Pranowo kepada wartawan di Semarang Kamis (10/11). Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, pra kondisi sebelum penetapan UMK di Jawa Tengah sudah dilakukan. Pemprov Jawa Tengah intens berkomunikasi dengan para buruh dan pengusaha. "Frekuensi sudah sama antara perwakilan buruh dengan pengusaha. Tingga informasi ini kita sampaikan ke pusat. Dua komponen pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan menjadi pertimbangan kawan-kawan buruh untuk menetapkan UMK," ujar Ganjar Pranowo. Ganjar mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah menyampaikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 akan diumumkan 21 November 2022. Saat ini Kementerian tenaga kerja masih melakukan formulasi dari masukan-masukan yang ada. Pembahasan penetapan UMP ini dilakukan oleh Dirjen PHI-Jamsos. (Bdi)-f

ANTISIPASI KENAikan KASUS COVID-19 Protokol Kesehatan Harus Tetap Dipatuhi

MAGELANG (KR) - Hampir di semua daerah terjadi kenaikan kasus Covid-19, termasuk di wilayah Kabupaten Magelang. Karena itu Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP berharap agar protokol kesehatan diminta untuk tetap dipatuhi. Warga juga diminta untuk menghindari kerumunan-kerumunan.

Harapan itu disampaikan Bupati Magelang saat ditemui usai melakukan ziarah ke TMP Giri Dharmoloyo II Cawang Kabupaten Magelang usai pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan Tahun 2022 di halaman Setda Kabupaten Magelang, Kamis (10/11). "Yang penting tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita harus tetap beraktivitas, tetap produktif, tetapi kita juga tetap harus sehat, diantaranya dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan," tambahnya.

Pemerintah daerah juga tetap berupaya melakukan penekanan-penekanan, sehingga tidak perlu khawatir. Masalah vaksin, baik yang pertama, kedua maupun Booster, juga memperoleh perhatian Bupati Magelang. Bupati Magelang meminta untuk segera melaksanakan vaksinasi, termasuk Booster, karena itu untuk menjaga daya tahan tubuh.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang dr Sunaryo, mengatakan kasus yang terjadi saat ini bukan penularan udara, tetapi dari droplet. Ada interaksi orang per orang. Kalau dahulu cukup dibatasi dengan PPKM, sekarang belum dievaluasi. Kegiatan perkantoran juga sudah penuh, dan kondisi sekarang nyaris seperti normal. Karena itu untuk mengantisipasi, perlu digalakkan protokol kesehatan sambil menunggu asesmen dari Kementerian Kesehatan, perlu ada evaluasi lagi di PPKM-nya.

Gejala-gejalanya, tingkat kematiannya tidak terlalu tinggi. Di wilayah Kabupaten Magelang ada yang isolasi mandiri (isoman) dan ada juga yang dirawat. Tetapi tetap berbahaya pada person yang komorbid, memiliki penyakit lain seperti hipertensi, DM (Diabetes Melitus) maupun lainnya, termasuk usia lansia. (Tha)-f



Bupati Magelang melakukan tabur bunga di TMP Giri Dharmoloyo II Cawang Kabupaten Magelang.

DISPERTAN WONOGIRI MANFAATKAN ANGGARAN DBHCHT

Swadaya dan Gotong Royong Petani Desa Masih Tinggi

WONOGIRI (KR) - Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Ari Sumantri menilai semangat masyarakat Wonogiri khususnya Kecamatan Eromoko untuk berswadaya dan gotong royong masih tinggi.

Bahkan menyerahkan sebagian tanah miliknya untuk pembangunan jalan tembus bantuan program yang dibiayai dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) tanpa ganti rugi sepeserpun rela dilakukan.

Menurut Ari, Dusun Eromoko Wetan Desa/Kecamatan Eromoko Wonogiri mendapat proyek jalan produksi guna memudahkan akses para petani tembakau setempat. Jalan produksi sepanjang 500 meter dengan bantuan pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 100 juta.

"Realisasi di lapangan jalan JUT yang kini hampir selesai itu nilainya sekitar Rp 300-Rp 400 juta," kata Kadus Eromoko Wetan Saryono didampingi Pengawas JUT Desa Ero-

moko Tri Mulyanto saat ditemui di lokasi proyek, Kamis (10/11) siang.

Dijelaskan, sebelum dibangun dengan cor semen jalan tersebut hanya berupa 'galengan' sawah selebar 0,5 meteran saja. Untuk membangun jalur JUT, ujar Kadus, petani yang lahannya terkena proyek dengan suka rela menyerahkan tanpa menuntut uang ganti rugi.

Nilai swadaya masyarakat paling menonjol dari tenaga kerja gratis selama proyek berlangsung. Selain itu, pemerintah desa melalui Klontan Sido Dadi Desa Eromoko mendapat bantuan tanah urug jalan produksi hampir sebanyak 90 rit (truk) dari tokoh masyarakat setempat Ari Sumantri yang juga anggota FPDIP DPRD Kabupaten Wonogiri.

Sosok wakil rakyat yang satu ini hanya berharap petani desanya lebih maju, mandiri dan sejahtera hidupnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Wonogiri Baroto SP MSi melalui Kabid Sarpras Dispertan Giyanto SP

MMA mengemukakan dinasnya digelontor anggaran Rp 2,3 miliar lebih dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2022.

Dengan stimulan tersebut untuk mengcover pembangunan jalan produksi dan jaringan irigasi Rp 1,2

M lebih, pemberian Bansos Pupuk NPK untuk 63 Klontan di 9 kecamatan (29 desa) senilai Rp 1,1 M lebih serta untuk Bansos Alat Mesin Pertanian (Alsintan) jenis Cultivator bagi 20 Klontan sekitar Rp 271 juta. (Dsh)-f



Pembangunan jalan produksi di Eromoko hampir selesai.

Warga Wadas Minta Pemerintah Realisasikan Tiga Tuntutan

PURWOREJO (KR) - Sebagian warga kontra kuari Bendungan Bener di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo mengalah kepada pemerintah dengan merelakan tanah untuk dibebaskan. Namun demikian, mereka meminta pemerintah merealisasikan tiga tuntutan sebagai syarat dilaksanakannya pembebasan lahan itu.

Tuntutan itu disampaikan kepada sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang berkunjung ke desa itu, Kamis (10/11). Pertemuan itu dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama dihadiri belasan warga Wadas kontra kuari serta perwakilan warga Desa Guntur yang menjadi lokasi pembangunan bendungan. Sementara itu sesi kedua dihadiri belasan warga pro kuari.

Mereka menyampaikan aspirasinya kepada Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Desmond Junaedi Mahesa. "Kami sampaikan tiga tuntutan utama yang harus direalisasikan pemerintah," tegas perwakilan warga kontra, Fuad

Rofiq, kepada KR, usai diterima Komisi III DPR RI di Balai Desa Wadas.

Menurutnya, tiga tuntutan itu adalah pertambahan harus dihentikan setelah kebutuhan batu andesit Bendungan Bener terpenuhi. Potensi batu andesit di bukit Wadas mencapai 41 juta meter kubik dan yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan hanya 15 juta meter kubik. "Harus berhenti di 15 juta meter kubik itu, sesuai kapasitas saja," katanya. Selanjutnya, lahan pascatambang yang akan dijadikan destinasi wisata juga harus dikelola warga. Warga siap membangun koperasi dan desa juga me-

miliki bumdesa.

Selain itu, lanjutnya, warga juga menuntut gubernur untuk membangun Desa Wadas dari berbagai aspek. "Infrastruktur, SDM, berbagai fasilitas, dan lainnya, sehingga kalau Wadas menjadi desa wisata, warga sudah siap," terangnya. Fuad juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan warga Wadas yang tidak menerima Uang Ganti Rugi (UGR) tapi merasakan dampak akibat dilaksanakannya tambang.

"Juga meminta kepada pemerintah untuk menghormati saudara kami yang masih menolak tambang, jangan jatuhkan hukuman konsinyasi kepada mereka. Pemerintah harus bijak menyikapi hal ini," ungkapnya.

Menurutnya, tuntutan tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ketika menerima warga kontra pada Juni 2022. Ganjar, katanya, merepons positif tuntutan itu. "Na-

mun, secara hukum masih belum kuat, kami belum punya legal standing sehingga tuntutan ini bisa saja hilang jika pemerintah berganti. Maka kami titipkan kepada Komisi III DPR RI agar bisa terwujud MoU yang secara hukum kuat dan terkawal dengan baik," paparnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan, ada sejumlah catatan yang diperoleh dari pertemuan dengan warga Desa Wadas. Hal itu akan dibicarakan dengan gubernur dalam pertemuan yang digelar di Semarang, Jumat (11/11).

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menambahkan, hasil yang diperoleh dari pertemuan dengan warga kontra dan pro kuari akan menjadi bahan rapat dengan Ganjar Pranowo, kapolda, kajati, dan pangdam. "Untuk bahan rapat, yang akan kami tanyakan dan tanggapinya kami mendapatkan pemaparan dari gubernur," tandasnya. (Jas)-f

Polda Jateng Gelar Istighosah dan Doa Bersama

SEMARANG (KR) - Dalam menciptakan situasi aman dan kondusif di tengah masyarakat memang harus terus diupayakan dengan kerja keras dan tidak lupa doa. "Apabila semua usaha telah dilakukan namun belum ditemukan penyelesaian yang tepat, maka sebagai umat beragama kita meminta pertolongan kepada Tuhan," ungkap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada acara Istighosah dan doa bersama, Kamis (10/11) malam di Mapolda Jateng.

Hadir pada acara doa bersama dilaksanakan secara bergiliran oleh para tokoh lintas

agama Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Wagub Jateng Taj Yasin Maemoen, Ketua MUI Jateng KH Ahmad Daroqi, dan pengurus FKUB Jateng tokoh lintas agama. Selain itu para pejabat utama Polda Jateng, para kapolda dan ratusan anggota Polri itu diawali istighosah dan dilanjutkan tausiah oleh KH Supandi. Lebih lanjut dikatakan Ganjar doa merupakan upaya setiap umat beragama untuk memasrahkan kepada Tuhan agar setiap tantangan dan permasalahan bisa mendapat penyelesaian.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi me-

ngatakan doa bersama untuk negeri dan polisi, ditujukan dalam rangka terciptanya Harkamtibmas. "Ke depan, dengan adanya doa bersama lintas agama ini akan melaksanakan tugas pokok khususnya Polri dan Harkamtibmas, untuk bisa menangkap harapan masyarakat di pelaksanaan tugasnya," ungkapnya. Tugas yang dimaksud, Polri sekarang ini juga turut melakukan pengamanan menjelang pelaksanaan kegiatan G20 di Bali. Selain itu, termasuk juga pengamanan terkait pelaksanaan Pilkada dan Pilpres 2024 mendatang. (Cry)-f